

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	4
PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR GAMBAR	14
DAFTAR TABEL.....	14
INTISARI.....	15
ABSTRACT.....	16
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang Masalah.....	17
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian	24
1.4 Literature Review.....	25
1.5 Kerangka Pemikiran.....	37
1.6 Argumen Riset	42
1.7 Metode Penelitian.....	44
1.8 Sistematika Penulisan.....	46
BAB II.....	50
TERITORIALISASI KEDAULATAN NEGARA DI ACEH SEBELUM	
BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI 2004	50
2.1 Teritorialisasi Kedaulatan Negara di Aceh era Daud Beureueh : Islam sebagai Aktan	51
2.1.1 Fase Daud Beureueh bergabung ke NKRI : Teritorialisasi Kedaulatan.....	55
2.1.2 Fase Daud Beureueh bergabung dengan DI/TII : Deteritorialisasi dan Reteritorialisasi Kedaulatan.....	60
2.2 Deteritorialisasi Kedaulatan Negara era GAM : Sumber Daya Alam sebagai Aktan Perlawanan GAM	67
2.2.1 Konstruksi Identitas, Nasionalisme, Serta Perkembangan GAM : Jejaring dibalik Perlawanan GAM.....	68
2.2.1.1 Konstruksi Identitas dan Nasionalisme GAM	68
2.2.1.2 Perkembangan GAM	74
2.2.2 Upaya Reteritorialisasi Kedaulatan Negara era Perjuangan GAM : Hak Otonomi Daerah sebagai Aktan	77
2.2.2.1 Era Suharto (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998).....	77
2.2.2.2 Era BJ. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999).....	83

2.2.2.3	Era Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001).....	85
2.2.2.4	Era Megawati Sukarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004).....	88
2.2.2.5	Era Susilo Bambang Yudoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014).....	90
BAB III		95
KEDAULATAN MENGALAMI KRISIS? : PENANGGULANGAN		
BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI ACEH 2004 DAN		
DETERITORIALISASI KEDAULATAN NEGARA.....		95
3.1	Peristiwa Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 dan Dampaknya: Sumber Keguncangan Praktek Kedaulatan Negara.....	96
3.2	Kedaulatan Mengalami Krisis ? : Dilema Negara antara Terbatasnya Kemampuan Versus Besarnya Kebutuhan.....	102
3.2.1	Desakan Negara Asing dan Komunitas Internasional	105
3.2.2	Gagasan Sovereignty as Responsibility.....	107
3.2.3	Media Massa dan Penyebaran Informasi berbasis Teknologi Internet.....	109
3.3	Dibukanya Perbatasan Negara untuk Bantuan Asing : Deteritorialisasi Kedaulatan Negara	114
3.4	Pembatasan Masa Tanggap Darurat : Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara	121
BAB IV		126
RETERITORIALISASI KEDAULATAN : NORMA DISASTER RISK		
REDUCTION SEBAGAI AKTAN DALAM REKONSTRUKSI PERUMAHAN		
PASCA BENCANA DI ACEH		126
4.1	Munculnya Norma Disaster Risk Reduction sebagai Aktan yang Cross Territorial	128
4.1.1	Jejaring Ilmuwan sebagai Pendorong Gagasan DRR.....	133
4.1.2	Lembaga PBB -UNISDR	136
4.2	Sosialisasi dan Upaya Mendorong Pengadopsian Norma dalam Forum Internasional : Proses Multi layer.....	139
4.2.1	WCDRR I – Strategi Yokohama	139
4.2.2	WCDRR II - Strategi Hyogo	141
4.2.2.1	Tsunami Summit 2005.....	145
4.2.2.2	Konferensi Kementrian Asia tentang Pengurangan Bencana - Beijing 2005 146	
4.2.2.3	Konferensi Asia Tentang Pengurangan Bencana – Seoul Korea Selatan Maret 2006 146	
4.2.2.4	Inisiatif UNESCAP tentang Pengurangan Resiko Bencana	147
4.2.2.5	Workshop Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Bencana – Jakarta Indoneisa Februari 2006.....	148
4.2.2.6	World Summit 2005.....	149
4.3	Internalisasi Norma DRR dan Prinsip Build Back Better dalam Program Rekonstruksi Perumahan di Aceh	150
4.3.1	Latar Belakang pengadopsian Norma DRR dalam Managemen Bencana di Indonesia : Kesadaran Bencana sebagai Aktan dalam Manajemen Bencana Indonesia	151
4.3.1.1	Kebijakan Manajemen Bencana Periode 1930 – 1960an	157
4.3.1.2	Kebijakan Penanggulangan Bencana 1960-1990.....	160
4.3.1.3	Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia Tahun 1990-2000.....	164
4.3.1.4	Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia 2000-2007.....	166

4.3.2	Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pengadopsian Norma DRR : Kepatuhan Negara	173
4.3.2.1	Membuat Payung Hukum dan Regulasi Pendukung Implementasi Strategi Hyogo	174
4.3.2.2	Merancang Pembangunan dengan Perspektif DRR	176
4.3.2.3	Membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana di level Nasional dan Daerah	177
4.3.2.4	Menyusun Rencana Pendanaan Penanggulangan Bencana	180
4.4	Prinsip Build Back Better sebagai Representasi Norma DRR : Resolusi Konflik sebagai Syarat untuk Rekonstruksi Aceh	181
BAB V		197
MERANGKAI KEMBALI KEDAULATAN : RETERITORIALISASI KEDAULATAN NEGARA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM REKONSTRUKSI PERUMAHAN DI ACEH PASCA BENCANA 2005		197
5.1	Reteritorialisasi Kedaulatan melalui Upaya Pengelolaan Dana Rehabilitasi Rekonstruksi : Jejaring Dana Rekonstruksi sebagai Aktan	199
5.2	Reteritorialisasi Kedaulatan Negara melalui Proses Pengorganisasian Program Rekonstruksi Aceh : Upaya Menegakkan Kontrol Negara	208
5.2.1	Dilema Reteritorialisasi Kedaulatan Negara dan Tuntutan Rekonstruksi Aceh : Badan Lokal atau Nasional ?	210
5.2.2	BRR sebagai Jalan Tengah : Antara Upaya Reteritorialisasi Kedaulatan Negara dan Tuntutan Donor Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Perumahan	213
5.2.2.1	Organisasi BRR : Membangun Kontrol dan Fleksibilitas	215
5.2.2.2	Tantangan Rekonstruksi dan Strategi BRR : Membangun Kolaborasi	218
5.3	Reteritorialisasi Kedaulatan Negara melalui Proses Eksekusi Program Rekonstruksi Perumahan : Upaya Merangkai Kedaulatan ?	232
5.3.1	Mempersiapkan Tata Ruang dan Lahan : Menegakkan kredibilitas Negara	236
5.3.2	Membangun Rumah : Pekerjaan Lokal dengan Sumber Daya Cross Teritorial	248
BAB VI KESIMPULAN		266
6.1	Temuan Studi :	270
6.1.1	Faktor Network atau jejaring fungsional untuk menjelaskan dinamika konsep dan praktek kedaulatan negara	271
6.1.2	Faktor non human menjadi aktan penting dalam konstruksi konsep dan praktek kedaulatan negara	271
6.1.3	Aktan yang berperan dalam konstruksi konsep dan praktek kedaulatan negara bersifat cross teritorial	273
6.1.4	Konsep dan Praktek Kedaulatan Negara tidak statis, tetapi mengalami proses pembentukan dan perubahan yang dinamis	275
6.2	Kontribusi Studi	276
6.3	Agenda Riset Ke Depan	278
DAFTAR PUSTAKA		280
LAMPIRAN		291
DATA NARASUMBER		299